

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kemajuan suatu negara. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa semakin tahun berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terlepas dari pro dan kontra dari berbagai kalangan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, hal yang wajar sebenarnya karena setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda.

Pendidikan terlalu besar untuk diselesaikan oleh salah satu komponen sistem masyarakat kita, entah itu pemerintah, lembaga pendidikan, para pakar pendidikan, atau lembaga swadaya masyarakat dan komponen lainnya.¹

Dalam undang-undang pasal 35 No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, mengamanatkan pada kita agar memiliki Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagai acuan dan pengendalian pendidikan.² Selain disebutkan dalam undang-undang, disebutkan juga dalam turunannya, yakni peraturan pemerintah (PP) No. 19. Bahwa SNP adalah kriteria minimal

¹ Sambutan Rektor UNJ dalam buku *Mengurai Benang Kusut Pendidikan; Gagasan Para Pakar Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

² Zainal Aqib, *Membangun Prestise Sekolah Standar Nasional SSN & SBI sekolah berstandar Internasional*, (Bandung : Yrama Widya, 2010), hal. 1

pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.³ PP memberikan arahan tentang 8 standar pendidikan Nasional, yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan terakhir standar penilaian pendidikan.

Selama ini, kita melihat kegagalan dari sistem pendidikan kita, terlihat dari berbagai kebijakan yang terputus atau tidak berkesinambungan. Kebijakan bongkar pasang dalam sistem pendidikan, tidak membawa kita ke arah yang jelas malah berputar-putar dan jalan di tempat. Misalnya pembaharuan sistem pendidikan pada tahun 70-an, dengan melakukan eksperimen yang berskala luas, berusaha menciptakan rancangan sekolah yang komprehensif dengan menggunakan sistem kurikulum berupa modul. Begitu selesai proyeknya, berganti menteri berganti pula kebijakannya dan rancangan yang telah menghasilkan biaya berjuta-juta seolah lenyap begitu saja. Kebijakan yang dibuat dari waktu ke waktu seringkali bukan berdasarkan pada hasil observasi atau penelitian praktis di Indonesia sendiri, tetapi mengadopsi dari sistem kebijakan negara lain.

Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi tiga bagian, *Pertama* berupa perangkat keras (*hardware*) yang meliputi tempat belajar, sarana

³ Inawati, *Model Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar*, (Bandung: Pusat Pengembangan & pembudayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), 2009), hal. 1

prasarana, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Kedua, perangkat lunak (*software*) yang berupa kurikulum, program pengajaran, manajemen sekolah, dan sebagainya. Ketiga perangkat berfikir (*brainware*) yang meliputi keberadaan guru, kepala sekolah, dan semua pihak yang terkait dengan sistem pembelajaran.

Salah satu unsur untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas adalah kurikulum, yang posisinya sendiri dalam keseluruhan proses pendidikan begitu sentral dan penting. Posisi kurikulum dapat dicontohkan seperti halnya posisi pemerintah pusat di tengah-tengah pemerintah daerah dalam suatu wilayah kesatuan negara.⁴

Pada dasarnya kurikulum berisi tentang tujuan, metode, media, evaluasi bahan ajar dan pengalaman belajar. Kurikulum yang baik senantiasa berubah dan bersifat dinamis, tidak statis. Selalu bisa menyesuaikan terhadap lingkungan, entah itu dari lingkungan pendidikan maupun dari luar pendidikan dan tantangan global (*up to date*). Dengan kata lain, suatu kurikulum akan mampu berperan sebagai alat mencapai tujuan pendidikan jika sanggup merubah dirinya dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.

Dalam pengembangan kurikulum sebaiknya berorientasi pada keperluan masa depan, dengan zaman yang terus berubah maka kurikulum yang baik harus mampu memenuhi permintaan dari semua dimensi kehidupan. Artinya kurikulum harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks inilah pengemban tanggungjawab pengembangan kurikulum perlu terus menerus

⁴ Lias Hasibuan, *Kurikulum & Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hal 21.

melakukan perencanaan kembali atau merevisi kurikulum yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pengembangan kurikulum juga harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan anak didik, keadaan lembaga pendidikan, dan kondisi daerah, baik berupa materi yang diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan evaluasi keberhasilan belajar mengajar.

Sebagai konsekuensinya, maka setiap guru (sebagai subjek pengembang kurikulum) bertanggungjawab dan menyambut permintaan dan kebutuhan atas perubahan. Perubahan-perubahan itu harus direncanakan melalui proses yang logis rasional dan valid. Dengan demikian setiap guru harus senantiasa berusaha merelevansikan pendidikan yang diberikannya dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Tanggung jawab ini pada gilirannya menuntut tingkat pengetahuan, keterampilan dan pengalaman agar mampu mengembangkan kurikulum secara terus menerus.

Terhadap konsep masyarakat yang terus berubah dengan cepat dan implikasinya terhadap perubahan kurikulum, maka umumnya para guru dapat dikategorikan menjadi tiga golongan.

Golongan pertama, terdiri para guru yang responsive terhadap kegiatan pengembangan kurikulum secara berkesinambungan dan uji coba atau semacam eksperimen. Golongan kedua, adalah para guru yang lebih menyukai mengikuti dengan baik dan patuh kurikulum yang ada atau sedang dilaksanakan tanpa berusaha melakukan usaha perbaikan atau perubahan. Apa yang baik menurut

pandangan guru adalah baik bagi semua siswa. Golongan ketiga, adalah para guru yang menentukan isi kurikulum bergantung selera, atau minat dan kemampuan guru sendiri. Apa yang menjadi minat guru dapat saja dimasukkan dalam kurikulum, sehingga pada akhirnya kurikulum terus menerus ditambah, dilengkapi, pada gilirannya timbul ketidakseimbangan dalam kurikulum.⁵

Ketiga sikap tersebut masing-masing memiliki kelemahan. Terlalu sering melakukan inovasi dan melaksanakan eksperimen dapat menimbulkan kebingungan. Sementara eksperimen sedang berlangsung ternyata keadaan telah berubah, tentu kurikulum menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sikap yang ketiga terlalu menekan pada minat dan kemampuan guru secara individual, akan menyebabkan kurikulum itu menjadi terlalu berat bagi para siswa, sehingga akan disangsikan keberhasilannya, terutama pada kurikulum PAI yang dewasa ini mengalami misorientasi dan salah strategi.

Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional, hal tersebut dijelaskan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 2 bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama”, termasuk salah satunya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dilaksanakan untuk mengembangkan potensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.

⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 103.

Kurikulum dan pembelajaran PAI di SMP dirancang untuk mengantarkan siswa kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak yang mulia. Semua itu dapat dicapai dengan terlebih dahulu jika siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan benar terhadap ajaran agama Islam, sehingga terinternalisasi dalam penghayatan dan kesadaran untuk melaksanakannya dengan benar. Dengan demikian kurikulum dan pembelajaran PAI yang dirancang seharusnya dapat mengantarkan siswa kepada pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan tentang agama Islam dengan kemampuan pelaksanaan ajaran serta pengembangan nilai-nilai akhlakul karimah.

Hal inilah yang melatar belakangi peneliti mengangkat judul skripsi **“Upaya Guru Dalam Mengembangkan Desain Kurikulum PAI di SMPN 2 Ngimbang Lamongan”**. Dari sini peneliti ingin mengetahui lebih banyak mengenai upaya guru dalam mengembangkan desain kurikulum khususnya PAI untuk mencapai tujuan pembelajaran.

B. Rumusan Masalah

Sebelum peneliti memaparkan rumusan masalah, peneliti memfokuskan kajian penelitian pada mata pelajaran PAI aspek fiqih.

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Desain Kurikulum PAI di SMPN 2 Ngimbang Lamongan?
2. Bagaimana Upaya Guru dalam mengembangkan desain kurikulum PAI di SMPN2 Ngimbang Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana desain kurikulum PAI di SMPN 2 Ngimbang Lamongan.
2. Mengetahui Upaya guru dalam mengembangkan desain kurikulum PAI di SMPN 2 Ngimbang Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman tentang hal berkaitan dengan kurikulum (PAI khususnya).
2. Bagi pengajar, bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan menjadi tolak ukur dalam mengembangkan kurikulum, sebagai langkah untuk mencapai hasil pembelajaran.
3. Bagi pihak sekolah, tentunya hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam pengembangan kurikulumnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis, antara lain adalah Tesis yang ditulis oleh Mohamad Tulus, Program Pascasarjana Jurusan Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2012) yang berjudul “*Pengembangan Kurikulum PAI Muatan Lokal Madrasah Aliyah (MA) Nurul Jadid Paiton dalam Meningkatkan Mutu Lulusan*” tesis ini menunjukkan hasil penelitian yaitu (1) Perencanaan yang dilakukan MA Nurul Jadid dalam mengembangkan PAI muatan lokal meliputi; merumuskan tujuan, menentukan bahan pembelajaran (isi), dan merumuskan strategi pelaksanaan. (2) Dalam implementasinya MA Nurul Jadid dalam mengembangkan PAI pada muatan lokal dilaksanakan secara terpadu pada kegiatan intrakurikuler dan secara terpisah pada ekstrakurikuler dengan program tutorial sore hari dan madrasah diniyyah malam hari. Untuk yang masuk pada intrakurikuler pelaksanaannya dikoordinir oleh waka kurikulum, dan untuk yang tutorial sore hari dalam implementasinya dikoordinir oleh ketua program di masing-masing jurusan, sedangkan untuk yang madin malam hari dikoordinir oleh seseorang yang ditunjuk dan disertai tugas oleh MA Nurul Jadid untuk mengelola madin tersebut. (3) Dalam penilaiannya menggunakan instrument tes baik secara tertulis lisan maupun tindakan. Untuk kegiatan penilaian kurikulumnya diperoleh dari hasil penilaian belajar siswa, lulusan, serta hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah setiap enam bulan sekali. (4)

Untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan kurikulum PAI muatan lokal, MA Nurul Jadid melihat dari aspek ; Prestasi siswa MA Nurul Jadid dalam bidang keagamaan, lulus UAN pada materi keagamaan, dan lulus masuk seleksi Perguruan Tinggi yang tes tulis dan lisannya berkaitan dengan materi keagamaan, seperti beasiswa santri yang diselenggarakan oleh Kemenag.

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Suwartini, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) yang berjudul "*Implementasi KTSP dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak Kelas VIII di MTs N Sleman Kota, Kabupaten Sleman Yogyakarta (Telaah Atas Metode Pembelajaran).*" Hasil dari penelitian ini adalah (1) Implementasi KTSP yang dikembangkan oleh MTs N Sleman Kota Yogyakarta adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan disusun oleh para stakeholder di bawah bimbingan dan arahan dari Kanwil DEPAG yang dilaksanakan oleh MTs N Sleman Kota sebagai kurikulum pendidikan, sedangkan konsep KTSP dalam mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah sebuah perangkat silabus, struktur kurikulum yang dikembangkan dan disusun oleh guru mata pelajaran Aqidah Akhlak berdasarkan KTSP Mts N Sleman Kota dan dilaksanakan oleh guru sebagai implementasi. (2) Pelaksanaan pembelajaran menggunakan berbagai metode namun guru yang bersangkutan belum sepenuhnya bisa membangkitkan motivasi siswa karena lebih didominasi dengan metode ceramah. (3) Faktor penghambat yang ditemukan yaitu dari pihak guru

yang belum bisa menguasai berbagai metode, dari siswa yang belum aktif dan sarana prasarana yang masih kurang.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muttaqin, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang (2008) yang berjudul "*Implementasi Pengembangan Kurikulum Madrasah Bertaraf Internasional di MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur.*" Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengembangan kurikulum di MA Nurul Jadid Paiton mengadopsi dan mengadaptasi kurikulum Internasional *Cambridge University* (Australia) sebagai salah satu negara anggota *Organization for Economic and Cooperation Development* (OECD) dengan tetap mengacu pada kurikulum KTSP. Kurikulum adaptif berorientasi pada Ilmu Matematika dan Sains, tetapi tidak mengesampingkan materi keagamaan sebagai identitas kemadrasahan maupun pesantren salaf. Pengembangan kurikulum madrasah bertaraf internasional di MA Nurul Jadid Paiton merupakan sintesis antara kurikulum internasional, kurikulum nasional serta kurikulum madrasah/pesantren sebagai integrasi antara IPTEK dan IMTAK yang dipandang perlu oleh masyarakat global. Dengan demikian menurut teori sistem/model pengembangan kurikulum yang demikian itu disamakan sistem rekonstruksi sosial.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Sadirman, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) yang berjudul "*Upaya Guru PAI dalam Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP Negeri 9 Yogyakarta.*" Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa upaya-

upaya guru dalam mengimplementasikan KTSP meliputi (1) Pengembangan program yang terdiri atas program tahunan, program semesteran dan program remedial. (2) Penyusunan silabus. (3) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP (4) Kegiatan belajar mengajar berbasis kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan hal-hal lain yang menjadi upaya guru PAI dalam rangka membentuk kompetensi peserta didik yang baik.

F. Definisi Operasional

1. Upaya Guru

Usaha / syarat / tindakan umum menyampaikan suatu maksud.⁶

Mereka yang memberikan pelajaran pada anak didik yang memegang suatu mata pelajaran tertentu.⁷

Yang dimaksud dengan upaya guru di sini adalah usaha-usaha atau tindakan yang dilakukan oleh guru PAI dalam mengembangkan desain kurikulum PAI.

2. Desain Kurikulum PAI

Desain adalah bentuk atau model bisa juga diartikan sebagai “proses untuk membuat atau menciptakan suatu objek baru”. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada bentuk atau rancangan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang

⁶ Sukanto & Tata Iryanto, *KBBI terbaru*, (Surabaya: Indah, 1996), h. 270.

⁷ Lailatul Hidayah, *Study Tentang Kualitas Mengajar Guru PAI*, (Surabaya, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999), h. 5.

digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Desain Kurikulum PAI adalah bentuk atau rancangan kurikulum mata pelajaran PAI.

3. SMPN 2 Ngimbang Lamongan

SMPN 2 Ngimbang Lamongan adalah salah satu jenjang pendidikan Menengah pertama yang dimiliki oleh negara. Sekolah ini terletak di desa Lamongrejo kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Sekolah ini adalah salah satu sekolah negeri di daerah tingkat kecamatan yang sedang merintis sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN).

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran isi Skripsi ini, berikut penulis sampaikan sistematika dalam pembahasan Skripsi ini, adapun selengkapnya sebagaimana dibawah ini:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka. Dalam Bab ini membahas tentang tinjauan tentang upaya guru dalam mengembangkan desain kurikulum PAI, tinjauan tentang pendidikan agama Islam.

⁸ Nik haryati, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Alfabeta. 2011). h.4.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini membahas berbagai hal terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tahap-tahap penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian. Dalam Bab ini akan memuat uraian tentang Data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III.

Bab V : Pembahasan. Dalam Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang merupakan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan di dalam penelitian.

Bab VI : Penutup. Bab VI ini membahas tentang simpulan-simpulan, kata penutup, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.